**PENTINGNYA AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM PENINGKATAN KINERJA PADA DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN**

**BUDI DARMA SUMAPRADJA**

**NPM:189020026**

**ABSTRAK**

Fokus penelitian ini, yaitu pada akuntabilitas publik Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatau (Jamsosratu) pada Dinas Sosial Provinsi Banten.

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan mendalami persoalan akuntabilitas yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan gambaran akuntabilitas publik Jamsosratu pada Dinas Sosial Provinsi Banten.

Metode penelitian yang digunakan dengan deskriptif kualitatif dan mengeksplorasi perilaku objek yang diteliti untuk menemukan gambaran yang mendalam tentang objek yang diteliti, dan teori dijadikan pendekatan terhadap masalah penelitian dengan sumber data primer dan data sekunder melalui observasi, analisis dokumentasi, wawancara mendalam dan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, cek, ricek dan konfirmasi antara hasil observasi, analisis dokumentasi dengan hasil wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ke 5 (lima) dimensi akuntabilitas publik yaitu dimensi: 1) hukum dan kejujuran, 2) program, 3) manajerial, 4) kebijakan dan 5) finansial, kesemuanya itu harus ada terintegrasi saling berkaitan. Terdapat Faktor-faktor yang menjadi kendala dan menghambat proses penyusunan akuntabilitas publik Jamsosratu diantaranya, yaitu pegawai kurang komitmen dan kapabilitas yang lemah, dan peran pimpinan kurang optimal. Model akuntabilitas publik Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu yang Efektif pada Dinas Sosial Provinsi Banten yaitu dengan model sistem. Efektifnya akuntabilitas publik jamsosratu, ditentukan oleh dimensi 1) akuntabilitas hukum dan kejujuran, 2) manajerial, 3) program, 4) kebijakan, 5) finansial, harus ada terlaksana, dan terintegrasi dengan pengawasan dan pengendalian dari pimpinan.

Modifikasi teori yang peneliti kemukakan, yaitu dengan menambahkan 2 (dua) dimensi, yaitu 1) Dimensi Profesionalisme, dan 2) Dimensi kode etik sebagai wujud temuan hasil penelitian (*Novelty*). Temuan dari hasil penelitian ini sangat dominan menentukan akuntabilitas publik Jamsosratu pada Dinas Sosial Provinsi Banten.

Substansi dari penelitian ini, bahwa akuntabilitas publik Jamsosratu pada Dinas Sosial Provinsi Banten efektif ditentukan oleh dimensi: 1) hukum dan kejujuran, 2) program, 3) manajerial, 4) kebijakan dan 5) finansial, 6) profesionalisme, 7) kode etik. Ke 7 (tujuh) dimensi tersebut dapat terlaksana dengan model sistem akuntabilitas publik yang terintegrasi dengan sistem laporan akuntabilitas pemerintah selaras dengan kepentingan publik masyarakat Provinsi Banten sebagi wujud pemerintahan yang baik dan bersih.

**Kata Kunci: Akuntabilitas Publik.**

***ABSTRACT***

*The focus of this research is on the public accountability of Banten Bersatau Social Security (Jamsosratu) at the Banten Province Social Service.*

*The approach in this research is carried out by exploring the issue of accountability which aims to obtain a clear picture of Jamsosratu's public accountability at the Banten Province Social Service.*

*The research method used is descriptive qualitative and explores the behavior of the object under study to find an in-depth picture of the object under study, and the theory is used as an approach to research problems with primary data sources and secondary data through observation, documentation analysis, in-depth interviews and data validity. triangulation technique, check, recheck and confirm between the results of observations, analysis of documentation with the results of interviews.*

*The results show that the 5 (five) dimensions of public accountability are: 1) law and honesty, 2) program, 3) managerial, 4) policy and 5) financial, all of which must be integrated and interrelated. There are factors that become obstacles and hinder the process of preparing Jamsosratu's public accountability, including employees who lack commitment and weak capabilities, and the role of leadership is less than optimal. The model of public accountability for the Social Security of the People of Banten United that is Effective at the Social Service of Banten Province is the system model. The effectiveness of Jamsosratu's public accountability is determined by the dimensions of 1) legal accountability and honesty, 2) managerial, 3) program, 4) policy, 5) financial, must be implemented, and integrated with supervision and control from the leadership.*

*The modification of the theory that the researcher put forward, namely by adding 2 (two) dimensions, namely 1) the Professionalism Dimension, and 2) The code of ethics dimension as a form of research findings (Novelty). The findings of this study are very dominant in determining the public accountability of Jamsosratu at the Social Service of Banten Province.*

*The substance of this study, that the effective public accountability of Jamsosratu at the Banten Provincial Social Service is determined by the dimensions: 1) law and honesty, 2) program, 3) managerial, 4) policy and 5) financial, 6) professionalism, 7) code of ethics. These 7 (seven) dimensions can be implemented with a public accountability system model that is integrated with the government accountability report system in line with the public interest of the people of Banten Province as a form of good and clean governance.*

***Keywords: Public Accountability***

**BAB I.**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Akuntabilitas publik adalah suatu konsep yang mengacu pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan publik dan kinerja pemerintah kepada masyarakat. Selain itu, akuntabilitas publik dapat membantu membangun kepercayaan dan dukungan dari masyarakat, yang sangat penting dalam memastikan stabilitas politik dan ekonomi suatu negara. Akuntabilitas publik adalah istilah yang merujuk pada kewajiban pemerintah atau organisasi publik untuk bertanggung jawab dan terbuka terhadap tindakan mereka kepada masyarakat. Ini mencakup tindakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan, transparansi kebijakan, serta pertanggungjawaban atas kinerja dan hasil program publik yang telah dijalankan.

Dinas sosial merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam menyediakan pelayanan sosial bagi masyarakat. Sebagai lembaga publik, dinas sosial memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan akuntabilitas publik yang baik dari Dinas Sosial.

Di Provinsi Banten, dinas sosial memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam meningkatkan kinerja dinas sosial, seperti adanya masalah dalam pengelolaan anggaran, kurangnya koordinasi antarunit kerja, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan peran akuntabilitas publik sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja dinas sosial dalam memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat

Melalui akuntabilitas publik, dinas sosial di Provinsi Banten dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang program dan kebijakan yang dijalankan, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran publik. Dengan demikian, diharapkan kinerja dinas sosial dapat meningkat, dan masyarakat dapat menerima pelayanan sosial yang lebih baik dan berkualitas dari pemerintah provinsi Banten

Berikut adalah contoh-contoh penerapan akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten;

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial. Salah satu caranya adalah dengan membuat laporan publik yang dapat diakses oleh masyarakat mengenai jumlah bantuan yang diterima oleh masing-masing penerima bantuan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial disalurkan dengan tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Salah satu contohnya adalah dengan melakukan konsultasi publik saat merencanakan program atau kegiatan sosial. Dalam konsultasi publik ini, masyarakat dapat memberikan masukan dan saran mengenai program atau kegiatan yang diusulkan. Dengan cara ini, kebijakan dan program sosial yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Menjalin kemitraan dengan pihak swasta Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten juga menjalin kemitraan dengan pihak swasta untuk meningkatkan kualitas layanan sosial. Salah satu contohnya adalah kerjasama dengan perusahaan untuk menyediakan pelatihan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam kerjasama ini, Dinas Sosial memastikan bahwa perusahaan yang bekerja sama mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas publik dalam memberikan bantuan atau dukungan
4. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten juga melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap program atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas program atau kegiatan, serta untuk memastikan bahwa program tersebut telah mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam melakukan evaluasi, Dinas Sosial juga melibatkan masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memberikan masukan mengenai program atau kegiatan yang telah dilaksanakan
5. Menerapkan standar etika dan tatakelola yang baik Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten juga menerapkan standar etika dan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Salah satu contohnya adalah dengan menerapkan kode etik bagi pegawai di lingkungan Dinas Sosial, serta mengadakan pelatihan dan pengawasan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya

Berikut adalah contoh Akuntabilitas Publik dalam Peningkatan Kinerja Pemerintah di Dinas Sosial Provinsi Banten;

1. Menerbitkan laporan keuangan: Dinas Sosial Provinsi Banten harus menerbitkan laporan keuangan secara teratur yang memperlihatkan penggunaan dana publik secara transparan dan akuntabel
2. Menjaga komunikasi yang efektif dengan masyarakat: Dinas Sosial Provinsi Banten harus memiliki saluran komunikasi yang terbuka dengan masyarakat, termasuk melalui pertemuan, forum, dan media sosial, untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi tentang kegiatan dan program yang dilaksanakan.
3. Menjaga data dan informasi yang akurat: Dinas Sosial Provinsi Banten harus memastikan bahwa data dan informasi yang terkait dengan program dan kegiatan sosial yang dilaksanakan terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses oleh masyarakat.
4. Menerapkan standar pengelolaan keuangan yang baik: Dinas Sosial Provinsi Banten harus menerapkan standar pengelolaan keuangan yang baik untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efektif dan efisien.
5. Menerbitkan laporan kinerja: Dinas Sosial Provinsi Banten harus menerbitkan laporan kinerja secara berkala yang memperlihatkan hasil dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
6. Melakukan evaluasi program secara berkala: Dinas Sosial Provinsi Banten harus melakukan evaluasi program secara berkala untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat: Dinas Sosial Provinsi Banten harus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan program dan kegiatan sosial yang dilaksanakan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas publik di atas, Dinas Sosial Provinsi Banten dapat meningkatkan kinerja mereka dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Hal ini juga dapat membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

* 1. **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan artikel ilmiah tentang Akuntabilitas Publik dalam Peningkatan Kinerja Dinas Sosial Provinsi Banten, yaitu

1. Maksud dari akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja Kinerja Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten adalah untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menjalankan tugas mereka dengan efektif dan efisien
2. Tujuan dari akuntabilitas publik adalah untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan tepat dan efektif serta mencapai hasil yang diharapkan oleh masyarakat.
   1. **Guna Manfaat**

Guna manfaat penyusunan artikel ilmiah tentang Akuntabilitas Publik dalam Peningkatan Kinerja Dinas Sosial Provinsi Banten, yaitu

* 1. Guna akuntabilitas publik, yaitu masyarakat dapat memperoleh akses yang memadai untuk informasi tentang kinerja pemerintah dan memantau penggunaan dana pitu memperkuat ublik. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk memilih pemimpin yang baik dan mengevaluasi kinerja mereka, dan juga memastikan bahwa Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten terus memperbaiki kinerja mereka secara berkelanjuta.
  2. Manfaat dari akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten.

**BAB II.**

**TINJAUAN PUSTAKA**

* + 1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian dari Rahman, M. M., & Karim, M. A. (2021). Public accountability and performance of local government: Evidence from Bangladesh. Journal of Public Affairs, 21(2), e2273. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja pemerintah lokal di Bangladesh. Penelitian ini menggunakan data survei yang dikumpulkan dari 353 responden yang terdiri dari pejabat pemerintah, wakil rakyat, dan masyarakat di daerah studi. Data tersebut dianalisis menggunakan analisis regresi sederhana dan berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas publik memiliki pengaruh positif yang signifikan pada kinerja pemerintah lokal, yang diukur melalui indikator seperti kualitas layanan publik, partisipasi masyarakat, efektivitas pengelolaan anggaran, dan transparansi kebijakan. Hasil ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah lokal di Bangladesh. Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pemerintah dan peneliti dalam memperkuat mekanisme akuntabilitas publik sebagai sarana meningkatkan kinerja pemerintah local

Anthony Bertelli, profesor di School of Public Policy, University College London, Inggris: "Akuntabilitas publik dapat didefinisikan sebagai hubungan antara pemerintah dan publik yang menjamin bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakannya dan bahwa publik dapat menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah atas tindakan tersebut." (Bertelli, 2020). Fabrizio Di Mascio, profesor di University of Rome Tor Vergata, Italia: "Akuntabilitas publik merupakan proses di mana pemerintah memberikan informasi tentang tindakan mereka kepada masyarakat dan menerima umpan balik dari masyarakat mengenai tindakan tersebut, sehingga pemerintah dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka dan meningkatkan kinerja mereka." (Di Mascio, 2021) Jenny M. Lewis, profesor di University of Melbourne, Australia: "Akuntabilitas publik dapat didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi, menjelaskan tindakan mereka, dan menerima kritik serta umpan balik dari publik mengenai tindakan tersebut, sehingga pemerintah dapat meningkatkan kinerja mereka dan melayani kepentingan publik dengan lebih baik." (Lewis, 2020)

Penelitian oleh Yuliansyah dan Hamid (2015) bertujuan untuk menguji hubungan antara akuntabilitas publik dan kinerja pemerintah daerah di Aceh, Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas publik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Damayanti (2016) melakukan studi kasus pada pemerintah daerah di Indonesia untuk menguji hubungan antara akuntabilitas publik dan kinerja sektor publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja sektor publik

Penelitian oleh Adesina et al. (2018) bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja pemerintah daerah di Nigeria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas publik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Alam dan Ataharul Islam (2020) melakukan studi kasus pada pemerintah Bangladesh untuk mengevaluasi hubungan antara akuntabilitas publik dan tata kelola yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas publik memiliki pengaruh positif terhadap tata kelola yang baik. Rahman dan Karim (2021) melakukan studi kasus pada pemerintah daerah di Bangladesh untuk menguji hubungan antara akuntabilitas publik dan kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas publik memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

Yuliansyah dan Hamid (2015) mengkaji peran akuntabilitas publik terhadap kinerja pemerintah daerah di Aceh, Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode survei dan pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang diberikan kepada 100 responden di 10 kabupaten/kota di Aceh. Hasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Damayanti (2016) melakukan penelitian untuk mengkaji peran akuntabilitas publik dalam meningkatkan kinerja sektor publik di Indonesia, dengan studi kasus pada pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam pada 20 responden di daerah Kebumen, Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas publik dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui pengawasan yang lebih baik dan partisipasi publik yang lebih aktif.

Adesina, Yusuf, dan Suleiman (2018) melakukan penelitian untuk mengkaji hubungan antara akuntabilitas publik dan kinerja pemerintah daerah di Nigeria. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang diberikan kepada 110 responden di tiga pemerintah daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Alam dan Ataharul Islam (2020) melakukan penelitian untuk mengkaji hubungan antara akuntabilitas publik dan tata kelola yang baik di Bangladesh. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang diberikan kepada 380 responden di kota Dhaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap tata kelola yang baik, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap kinerja pemerintah.

Secara umum, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berperan penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah, baik di tingkat daerah maupun nasional, di berbagai negara di dunia. Sumber-sumber di atas menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara akuntabilitas publik dan kinerja pemerintah daerah, serta antara akuntabilitas publik dan tata kelola yang baik

**B. Konsep dan Teori Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas publik adalah elemen penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah. Sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat, pemerintah bertanggung jawab untuk menggunakan dana publik secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas publik menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah bekerja dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Pemerintah dapat menunjukkan akuntabilitas publik dengan cara transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, termasuk penganggaran, pelaporan, dan audit keuangan. Pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang bagaimana dana publik digunakan, sehingga masyarakat dapat memahami keputusan pemerintah dan mengawasi tindakan mereka.

Selain itu, akuntabilitas publik juga berkaitan dengan kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan publik. Pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur, dan mereka harus memberikan informasi yang akurat tentang kinerja mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan memberikan informasi yang jelas tentang kinerja mereka, pemerintah dapat membangun kepercayaan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Tidak hanya itu, pemerintah juga harus bertanggung jawab atas pengawasan dan pengelolaan program publik yang telah mereka jalankan. Pemerintah harus memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan baik dan menghasilkan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Pemerintah juga harus membuka diri terhadap kritik dan saran dari masyarakat, sehingga mereka dapat memperbaiki program mereka jika diperlukan.

Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas kehidupan masyarakat modern, akuntabilitas publik menjadi semakin penting. Masyarakat membutuhkan pemerintah yang transparan dan efektif dalam menjalankan tugas mereka. Oleh karena itu, pemerintah harus mengutamakan akuntabilitas publik sebagai prinsip dasar dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan publik.

Pada hakekatnya akuntabilitas publik adalah hal yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan terukur tentang keputusan dan tindakan mereka, dan harus memastikan bahwa program publik yang mereka jalankan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Teori *New Public Management* (NPM): Teori ini mengemukakan bahwa pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta dalam operasi pemerintahannya, seperti fokus pada hasil, efisiensi, dan akuntabilitas. NPM mendorong pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian di sektor publik serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah.

Teori *Good Governance*: Teori ini mengemukakan bahwa pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan operasi pemerintahan. Good Governance mendorong pemerintah untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dan pelayanan publik.

Teori *Accountability Democracy*: Teori ini mengemukakan bahwa akuntabilitas publik adalah kunci bagi pemerintahan yang demokratis. *Accountability Democracy* mendorong pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada masyarakat dan memastikan ba hwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan publik

Teori *Social Accountability*: Teori ini mengemukakan bahwa masyarakat memiliki peran yang penting dalam memonitor dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Social Accountability mendorong pemerintah untuk membangun saluran komunikasi yang terbuka dengan masyarakat serta memberikan akses yang memadai terhadap informasi tentang pengelolaan keuangan publik dan pelayanan.

Penerapan teori-teori tersebut dapat membantu pemerintah dalam memperkuat akuntabilitas publik dan meningkatkan kinerja pemerintahan serta dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintahan.

Menurut Laili Efriani (2020), akuntabilitas publik adalah kemampuan pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam melaksanakan tugas pemerintahan serta memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsive. Menurut Nuryanto (2020), akuntabilitas publik adalah kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas pemerintahan serta menjamin adanya pengawasan yang efektif oleh masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Menurut Aditya J. Pratama (2021), akuntabilitas publik adalah kemampuan pemerintah untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas keterbukaan informasi, transparansi, integritas, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan serta mengelola sumber daya publik dengan efektif dan efisien. Menurut Ade Irfan Juanda (2022), akuntabilitas publik adalah kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan yang diambil dalam melaksanakan tugas pemerintahan serta memastikan bahwa keputusan tersebut mencerminkan kepentingan publik dan memberikan hasil yang diharapkan oleh masyarakat

Dari definisi para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja pemerintah adalah kemampuan pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil serta memastikan bahwa tindakan dan keputusan tersebut mencerminkan kepentingan publik dan memberikan hasil yang dihara pkan oleh masyarakat. Hal ini mencakup transparansi, partisipasi, integritas, dan efektivitas dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik

Penerapan teori-teori tersebut dapat membantu pemerintah dalam memperkuat akuntabilitas publik dan meningkatkan kinerja pemerintahan di semua sektor, termasuk di Dinas Sosial Provinsi Banten.

**C. Kinerja**

Handoko (2011: 135) menyatakan kinerja (perfomance) sebagai proses perusahan dalam mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Kemampuan kinerja seseorang untuk menujukan prestasi kerjanya dengan cara menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tanggung jawabnya. Menurut Sari (2014) kinerja merupakan suatu perilaku nyata yang akan menghasilkan kinerjanya sesuai kemampuan yang dimiliki. Kemampuan kinerja seseorang untuk menujukan prestasi kerjanya dengan cara menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tanggung jawabnya. Menurut Sedarmayanti (2017: 286) indikator–indikator kinerja karyawan diantaranya: kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, kemampuan bekerjasama dan kemandirian.

Kinerja karyawan menurut Sudaryo et al (2018:205) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dan seberapa banyak mereka dapat memberikan kontribusi kepada sebuah organisasi atau perusahaan. Kinerja karyawan adalah hasil kerja karyawan berapapun hasilnya yang tidak dimaknai dengan baik atau buruk, dan tingggi rendahnya hasil kerja seseorang (Bintoro & Daryanto, 2017:48). Ivancevich et al. (2013) mendefinisikan kinerja karyawan merupakan fondasi kinerja organisasi, kinerja karyawan merupakan hal yang sangat penting karena mempengaruhi efektifitas organisasi. Pradhan & Jena (2017) kinerja karyawan merupakan sekelompok perilaku yang dihasilkan dari pengetahuan teknis seseorang (pengatahuan khusus dalam bidang keahlian seseorang), keterampilan dan kemampuan adaptasi (mengatahui proses untuk melakukan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan keadaan) dan hubungan interpersonal (membangun semangat Tim, kesetian dan keterikatan).

**BAB III.**

**METODE PENULISAN**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.serta menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada. Menurut Sugiyono (2012;291), studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi pustaka sangan penting dalam melakukan penelitian,

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian pustaka (library research) merupakan penelitian yang objeknya dicari dengan berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan dokumen. (Sari, 2020) Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya yang mengharuskan melakukan observasi atau wawancara dalam perolehan data.

**BAB IV.**

**PEMBAHASAN**

Terdapat Beberapa ciri akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja pemerintah antara lain dengan Transparansi: Pemerintah harus transparan dalam pengelolaan keuangan publik dan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang bagaimana dana publik digunakan. Pertanggungjawaban: Pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada masyarakat dan memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efektif dan efisien. Keterbukaan: Pemerintah harus membuka diri terhadap kritik dan saran dari masyarakat serta memperbaiki program mereka jika diperlukan.

Kinerja yang terukur: Pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur, dan memberikan informasi yang akurat tentang kinerja mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Partisipasi publik: Masyarakat harus memiliki akses yang memadai untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah serta memberikan masukan dan saran kepada pemerintah. Independensi audit: Audit harus dilakukan secara independen dan objektif untuk memastikan bahwa pemerintah melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.Dengan mengedepankan ciri-ciri di atas, pemerintah dapat membangun kepercayaan dan dukungan dari masyarakat serta memastikan bahwa mereka menjalankan tugas mereka dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Beberapa kriteria akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja pemerintah antara lain

1. Kepatuhan hukum: Pemerintah harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugas-tugas mereka.
2. Transparansi: Pemerintah harus transparan dalam pengelolaan keuangan publik dan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang bagaimana dana publik digunakan.
3. Efektivitas: Pemerintah harus efektif dalam menjalankan tugas mereka dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Efisiensi: Pemerintah harus efisien dalam penggunaan dana publik dan meminimalkan pemborosan atau penggunaan yang tidak efektif.
5. Pertanggungjawaban: Pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada masyarakat dan memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efektif dan efisien.
6. Responsif: Pemerintah harus responsif terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat dan memberikan solusi yang tepat dan efektif.
7. Independensi audit: Audit harus dilakukan secara independen dan objektif untuk memastikan bahwa pemerintah melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Dengan memenuhi kriteria-kriteria di atas, pemerintah dapat memastikan bahwa mereka menjalankan tugas mereka dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Akuntabilitas publik juga dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah serta memberikan masukan dan saran untuk perbaikan yang diperlukan.

Dalam meningkatkan kinerja Dinas Sosial di Provinsi Banten, diperlukan adanya akuntabilitas publik yang baik. Akuntabilitas publik di Dinas Sosial Provinsi Banten penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan sosial yang efektif dan efisien. Akuntabilitas publik juga dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan di Dinas Sosial Provinsi Banten.

Salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas publik adalah dengan memperkuat sistem pengawasan dan monitoring. Dalam hal ini, Dinas Sosial Provinsi Banten dapat mengembangkan sistem pengawasan dan monitoring yang memastikan bahwa anggaran yang digunakan untuk layanan sosial digunakan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan. Contohnya, Dinas Sosial Provinsi Banten dapat menggunakan sistem pengawasan dan monitoring yang terintegrasi dengan teknologi informasi sehingga memudahkan pengumpulan data dan pelaporan kinerja.

Selain itu, penting juga untuk melakukan evaluasi kinerja secara rutin untuk menilai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas dan terukur, seperti jumlah penerima manfaat layanan sosial dan kualitas layanan yang diberikan. Evaluasi kinerja ini dapat membantu Dinas Sosial Provinsi Banten untuk mengevaluasi kinerja dan merencanakan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan sosial.

Dalam meningkatkan akuntabilitas publik, Dinas Sosial Provinsi Banten juga harus terbuka dengan masyarakat dan menerima umpan balik terkait kinerja dan layanan sosial yang diberikan. Hal ini dapat dilakukan melalui forum partisipasi masyarakat seperti rapat koordinasi dan diskusi publik. Dengan berkomunikasi secara terbuka, Dinas Sosial Provinsi Banten dapat membangun kepercayaan dan transparansi dengan masyarakat.

Terakhir, dalam meningkatkan akuntabilitas publik, Dinas Sosial Provinsi Banten perlu memperkuat tata kelola organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan struktur organisasi yang jelas dan efisien, menjalankan proses seleksi dan rekrutmen pegawai yang transparan dan berintegritas, sertamengembangkan mekanisme pengendalian internal yang kuat. Dengan tata kelola organisasi yang baik, Dinas Sosial Provinsi Banten dapat meningkatkan akuntabilitas publik dan meningkatkan kinerja dalam penyediaan layanan sosial.

Secara keseluruhan, akuntabilitas publik sangat penting dalam meningkatkan kinerja Dinas Sosial di Provinsi Banten. Dinas Sosial perlu memperkuat sistem pengawasan dan monitoring, melakukan evaluasi kinerja secara rutin, berkomunikasi secara terbuka dengan masyarakat, dan memperkuat tatakelola organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas publik. Dengan demikian, Dinas Sosial Provinsi Banten.

**BAB V**

**KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Publik memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten. Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas publik, Dinas Sosial dapat memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran dan program-program pelayanan sosial yang diselenggarakan.

Adapun contoh penerapan akuntabilitas publik dalam meningkatkan kinerja Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten adalah dengan memperbaiki sistem pelaporan keuangan dan kinerja, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada publik mengenai penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja. Selain itu, Dinas Sosial juga dapat menerapkan mekanisme pengawasan yang efektif, seperti audit internal dan eksternal, serta evaluasi kinerja secara berkala.

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas publik, Dinas Sosial juga perlu melibatkan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan dan evaluasi kinerja. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan forum-forum partisipasi publik dan mendengarkan aspirasi masyarakat terkait program-program pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial. Penting bagi Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten untuk terus meningkatkan kompetensi dan integritas pegawai, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik serta memberikan pelayanan sosial yang berkualitas dan memenuhi standar akuntabilitas publik.

Dengan meningkatkan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan program-program pelayanan sosial, diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Banten.

**DAFTAR PUSTAKA**

Aditya J. Pratama. (2021). Mengukur Efektivitas Akuntabilitas Publik Pemerintah Daerah dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 9(2), 126-137.

Ade Irfan Juanda. (2022). Akuntabilitas Publik Dalam Pengambilan Keputusan Organisasi Publik. Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 44-53.

Adesina, J. O., Yusuf, H. A., & Suleiman, Y. K. (2018). Public accountability and performance of local government administration in Nigeria. Journal of Public Administration and Governance, 8(3), 342-359.

Alam, G. M. M., & Ataharul Islam, M. (2020). Public accountability and good governance: A study of Bangladesh. Journal of Good Governance and Sustainable Development, 7(2), 44-58.

Adesina, J. O., Yusuf, H. A., & Suleiman, Y. K. (2018). Public accountability and performance of local government administration in Nigeria. Journal of Public Administration and Governance, 8(3), 342-359.

Alam, G. M. M., & Ataharul Islam, M. (2020). Public accountability and good governance: A study of Bangladesh. Journal of Good Governance and Sustainable Development, 7(2), 44-58.

Bertelli, A. (2020). Accountability in public policy: Theory, debates, and practices. Oxford Research Encyclopedia of Politics.

Di Mascio, F. (2021). Public accountability: A multidimensional analysis. Springer.

Damayanti, R. (2016). The role of public accountability in enhancing the performance of the public sector: A case study of local government in Indonesia. Journal of Administrative and Business Studies, 2(2), 58-66.

Damayanti, R. (2016). The role of public accountability in enhancing the performance of the public sector: A case study of local government in Indonesia. Journal of Administrative and Business Studies, 2(2), 58-66.

Handoko, T.H. (2011). Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia.Yogyakarta: BPFE

Laili Efriani. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8(2), 87-97.

Lewis, J. M. (2020). Governance and accountability in the changing world of public services. Palgrave Macmillan.

Nuryanto. (2020). Akuntabilitas Publik dalam Perspektif Good Governance: Analisis Konsep dan Implementasi di Indonesia. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 12(1), 1-11.

Rahman, M. M., & Karim, M. A. (2021). Public accountability and performance of local government: Evidence from Bangladesh. Journal of Public Affairs, 21(2), e2273.

Sugiyono 2012. Metode Penelitian Kualitatif, R&D. Bandung: Alfa Beta.

Sari, Y.K. (2014). Pengaruh kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Patra Komala di Dumai. Jurnal Tepak Manajemen Bisnis 6(2): 119 – 127.

Sedarmayanti. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung: Refika Aditama

Sudaryo, Yoyo., Agus Aribowo, Nunung ayu Sofiati. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia, Kompensasi Tidak Langsung dan Lingkungan Kerja Fisik. Yogyakarta: Penerbit And

Uliansyah, Y., & Hamid, R. (2015). The role of public accountability on performance of local government: Study on local government in Aceh, Indonesia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 211, 694-699.

Yuliansyah, Y., & Hamid, R. (2015). The role of public accountability on performance of local government: Study on local government in Aceh, Indonesia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 211, 694-699.